

ADVOKASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN BERITA HOAX UNTUK MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

Saza Rahmanda^{1(a)}, Afriva Khaidir^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
^{a)}syazarahmanda25@gmail.com, ^{b)}af.khaidir@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

16-08-2022

Diterbitkan Online:

31-10-2022

Kata Kunci:

Advokasi, Komunikasi, Hoax,
Literasi Digital

Keywords:

Advocacy, Communication,
Hoax, Digital Literacy

Corresponding Author:

syazarahmanda25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari literasi masyarakat dalam memahami validitas berita masih rendah, kebiasaan masyarakat untuk menyebarkan informasi (share) tanpa mencari kebenarannya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dan teknik purposive sampling sedangkan teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini adalah (1) Implementasi program advokasi untuk meningkatkan literasi digital oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, a. advokasi melalui kerjasama, advokasi melalui pengawasan. (2) Implementasi program komunikasi untuk meningkatkan literasi digital Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, a. advokasi dan komunikasi melalui sosialisasi, b. komunikasi melalui gerakan anti hoax. 3. Faktor yang mempengaruhi advokasi dan komunikasi dalam pencegahan penyebaran berita hoax oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, a. faktor penghambat, dan b.faktor pendukung.

ABSTRACT

This research departs from public literacy in understanding the validity of news is still low, people's habits to disseminate information (share) without seeking the truth. This type of research is qualitative with descriptive method, in this study the author uses purposive sampling methods and techniques while the technique used to test the validity of the data is by using triangulation techniques. The results of this study are (1) Implementation of advocacy programs to improve digital literacy by the Department of Communication and Information of West Sumatra Province, a. advocacy through cooperation, advocacy through supervision. (2) Implementation of communication programs to improve digital literacy by the Department of Communication and Information of West Sumatra Province, a. advocacy and communication through socialization, b. communication through the anti-hoax movement. 3. Factors influencing advocacy and communication in preventing the spread of hoax news by the Communications and Information Office of West Sumatra Province, a. inhibiting factors, and b. supporting factors.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.46>



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, salah satunya adalah dengan hadirnya media sosial.

Satu tahun terakhir ini masyarakat di Indonesia dihebohkan dengan isu berita bohong atau yang lebih dikenal dengan istilah Hoax. Beberapa diantaranya adalah berita datangnya sejumlah besar pekerja asing ilegal asal China ke Indonesia dan adanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) ganda di Jakarta yang tersebar di media sosial serta masih banyak lagi (<https://www.kompas.com>).

Banyak tanggapan dan tindakan yang diungkapkan baik oleh masyarakat, pemerintah dan juga penegak hukum dengan adanya berita ini. Salah satunya adalah ungkapan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang memerintahkan secara tegas untuk menindak keras kepada para pelaku penyebar berita bohong atau Hoax (<https://www.detik.com>).

Tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial faktanya masih

menuai permasalahan disisi penegakan hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan selama beberapa periode terakhir ada hampir 800 ribu situs di Indonesia yang telah diketemukan dan terindikasi sebagai penyebar berita bohong (<https://www.cnnindonesia.com>).

Ditemukannya situs yang berkonten berita bohong ini sayangnya tidak diiringi dengan terungkapnya pelaku dibalik dari pembuat situs atau penyebar berita bohong. Kasus KTP elektronik ganda misalnya, sampai saat ini penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian masih belum membuahkan hasil (<https://www.detik.com>).

Pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam penegakan hukum, terutama pembuktian pihak-pihak yang terkait proses penegakan hukum pidana terikat oleh proses dan cara-cara yang ditentukan undang-undang. Hal ini guna menjamin suatu proses pembuktian yang mewujudkan kebenaran (Tangkau, 2012; 33-34).

Tidak itu saja, berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dengan Bapak Jasman Rizal selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Beliau mengatakan:

"...Begini nak, untuk membendung hoax butuh strategi dari semua pihak mulai dari

komunitas, tokoh masyarakat atau agama, lembaga atau institusi atau korporasi, pemerintah, dan media. Dari komunitas misalnya, membuat narasi kontra hoax, edukasi literasi, advokasi dan silaturahmi. Sedangkan media menjadi ujung tombak untuk melawan hoax. Edukasi masyarakat untuk melawan dan mengidentifikasi hoax agar masyarakat tidak ikut menyebarkannya."

Lebih lanjut, Bapak Jasman Rizal mengungkapkan :

"... Proses advokasi yang harus kita lakukan adalah dimana masyarakat harus tau dulu bagaimana cara mengidentifikasi berita hoax. Untuk itu, kita di Diskominfo Sumatera Barat telah memberikan sosulisi kepada masyarakat, agar masyarakat itu sendiri mampu mengidentifikasi bahwa berita ini adalah hoax sehingga mereka tidak ikut menyebarkannya. Begini nak, untuk mengidentifikasi berita hoax, dapat dilakukan langkah-langkah seperti : hati-hati dengan judul provokati, cermati alamat situs, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta grup mendiskusikan kebenaran berita itu."

Lebih jauh, Bapak Jasman Rizal menerangkan :

"...Ya, perencanaan penanganan hoax ini tak selalu berjalan mulus, kalo saya lihat sih kebiasaan masyarakat yang cenderung menyebar informasi apalagi informasi/berita itu yang bersifat seksi/sensitif ya share aja langsung tanpa mencari kebenaran beritanya. Jadi, emang kebiasaan masyarakat kita yang seperti itu. Kita berharap semoga dengan edukasi ini ada perubahan."

Dari uraian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya proses advokasi dan komunikasi pencegahan berita hoax menjadi fokus utama. Diskominfo Sumatera Barat telah mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengidentifikasi bahwa berita yang tersebar ini hoax atau tidak.

Dalam konteks advokasi dan komunikasi pencegahan penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh Diskominfo Sumatera Barat antara lain, sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi berita hoax melalui media sosial dan media elektronik;
- b) Diskominfo Sumatera Barat selama tahun 2018-2020 sudah memblokir 249 situs media online yang terindikasi sebagai media propaganda dan media penyebar hoax;
- c) Diskominfo Sumatera Barat bekoordinasi dengan OPD dilingkungan Provinsi Sumatera Barat untuk menimalisir penyebaran berita hoax.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Advokasi dan Komunikasi Dalam Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Untuk Meningkatkan Literasi Digital Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat”

METODE PENELITIAN

Tipe riset ini merupakan kualitatif dengan tata cara deskripti. Metode yang dipakai buat mengukur kebenaran informasi yaitu dengan memakai metode triangulasi. Bagi Moleong serta lexy (2012: 230) Triangulasi merupakan metode pengecekan kebenaran informasi yang menggunakan suatu yang lain di luar informasi itu untuk kebutuhan sebagai pembandingan terhadap informasi pertama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Advokasi untuk Meningkatkan Literasi Digital oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

Indikator Input ialah terdapatnya target yang nyata, materi data atau pembelaan serta kesiapan pelakon pembelaan. Target aktivitas pembelaan tertuju pada para kreator ketetapan(decision makers) ataupun determinan kebijaksanaan(policy makers) bagus di aspek dalam ataupun di luar ataupun zona eksternal yang bisa mempengaruhi kepada khalayak. Dalam mengenali target butuh diresmikan siapa saja jadi target, kenapa butuh diadvokasi, apa kecenderungannya serta apa impian kita kepadanya.

Generasi native digital berlainan metode penglihatan serta sikap dengan angkatan yang terkini memahami pc serta telanjur menekuni internet. Angkatan digital migran dapat saja menekuni internet namun tidak semudah angkatan native digital yang lebih kilat menyambut serta menyesuaikan diri dengan

hadirnya teknologi internet yang telah dikenalkan semenjak kecilnya.

Anak kecil saat ini lebih kilat diajarkan mengenai permainan ataupun ikon dibandingkan dengan orang berumur yang tercantum dalam kalangan digital migran. Kanak- kanak kecil saat ini kilat menyesuaikan diri sebab telah terbiasa dengan simbol- simbol.

Tv pula mempengaruhi gap dampingi angkatan sebab tv memberitahukan adat terkenal (pop culture) yang lagi digandrungi cocok dengan generasinya. Hasrat masing- masing angkatan berlainan sebab dibesarkan dalam adat serta adat- istiadat yang berlainan (Kasali, 2010).

Terdapatnya pergantian pola komunikasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi ini jadi tantangan untuk warga paling utama angkatan digital native terpaut pendapatan serta penyebaran data yang tidak terbandung di alat sosial khususnya.

Bermacam berbagai data bisa dicari serta bisa dengan gampang diperoleh dengan metode browsing memakai koneksi internet alhasil warga wajib mempunyai penapis tertentu buat memilah serta berasumsi kritis terpaut data yang dicari supaya tidak terencana pada data yang menyesatkan.

Adapun program advokasi Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan literasi digital antara lain, sebagai berikut:

a) Advokasi Melalui Kerjasama

Diskominfo Sumatera Barat melakukan kerjasama supaya mempermudah kepolisian dalam bagan menghindari saat sebelum terbentuknya penyebaran data ilegal ataupun hoax di bumi maya. Pembelaan lewat kerjasama itu senantiasa terdapat bila sesuatu durasi diperlukan dengan pihak- pihak terpaut, bukan cuma Kepolisian saja tetapi kerjasama ini dicoba pada konsumen sosial alat itu sendiri dimana pihak kepolisian menghimbau pada para konsumen alat sosial online supaya tidak gampang memberitahukan data ataupun konten- konten yang belum tentu kebenarannya.

b) Advokasi Melalui Pengawasan

Pengawasan ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran informasi hoax pada media sosial di Provinsi Sumatera Barat. Advokasi dan komunikasi melalui pengawasan menjadi proses advokasi dan komunikasi yang sangat penting untuk

diterapkan di Provinsi Sumatera Barat. Pengawasan ini dicoba oleh timcyber di alat sosial online, bila terdapat akun-akun yang ditemukan mengedarkan konten-konten ataupun rumor sara, serta data hoax hingga badan cyber crime hendak segera memantau akun-akun itu serta bisa jadi hingga pada penghentian akun.

Implementasi Program Komunikasi untuk Meningkatkan Literasi Digital oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

Indikator proses, terdapat konsep aktivitas serta penerapan aktivitas pembelaan berbentuk forum, jaringan serta kegiatan serupa. Pembelaan ialah cara yang berkelanjutan serta adaptif dari berkas, pengorganisasian, serta formulasi data ke dalam alasan yang hendak dikomunikasikan lewat bermacam saluran alat serta antarpribadi dengan arti buat tingkatkan pangkal energi ataupun memperoleh pendapatan komitmen kepemimpinan politik serta sosial serta buat pengembangan program, dengan metode begitu menyiapkan warga buat penerimaannya. Sedangkan, program komunikasi Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan literasi digital antara lain, sebagai berikut :

a) Melakukan Komunikasi Melalui Sosialisasi

Sosialisasi ini berarti sekali dicoba dalam cara penyelesaian data hoax di alat sosial online, dengan metode ini kita sanggup menancapkan nilai-nilai atau norma-norma yang bagus pada konsumen alat sosial kalau data itu tidak dan merta datar dalam arti bagus seluruhnya terdapat pula data yang memiliki rumor sara serta ucapan dendam dan memiliki informasi hoax atau dusta, hingga dalam perihal ini diharapkan sanggup menghindari tindakan-tindakan seragam.

Proses komunikasi melalui sosialisasi sangat dibutuhkan. Karena dengan sosialisasi dapat mencerdaskan masyarakat sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengetahui kebenaran suatu berita sebelum menyebarkannya.

b) Melakukan Komunikasi Melalui Gerakan Anti Hoax

Gerakan anti hoax yang dilakukan oleh Diskominfo Provinsi Sumatera Barat. Diskominfo Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan acaranya. Proses

komunikasi melalui gerakan anti hoax ini akan lebih mudah diterima dan digaungkan oleh masyarakat sehingga masyarakat Sumatera Barat lebih cerdas dalam menggunakan media sosialnya.

Faktor yang Mempengaruhi Advokasi dan Komunikasi Pencegahan Penyebaran Berita Hoax oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

Output merupakan terdapatnya perhatian, keikutsertaan, sokongan dan kelangsungan bagus berbentuk kebijaksanaan, daya, anggaran, alat, keringanan, keikutsertaan dalam aktivitas atau aksi, serta lain-lain.

a) Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor yang menghambat proses advokasi dan komunikasi pencegahan berita hoax oleh Diskominfo Provinsi Sumatera Barat antara lain, sebagai berikut :

- Pelaku Menggunakan Akun Palsu. Faktor yang menghambat proses advokasi dan komunikasi pencegahan berita hoax oleh Diskominfo Provinsi Sumatera Barat yaitu pelaku penyebar berita hoax cenderung menggunakan akun palsu. Dan proses edukasi dan sosialisasi akan membuat masyarakat cerdas dan tak mudah menyebarkan berita yang tak jelas sumbernya. Ini langkah yang ampuh untuk mencegah penyebaran berita bohong di Provinsi Sumatera Barat ini.
- Komitmen Media Sosial Yang Sangat Menjaga Privasi Penggunanya. Faktor yang menghambat proses advokasi dan komunikasi pencegahan berita hoax oleh Diskominfo Provinsi Sumatera Barat yaitu komitmen media sosial yang sangat menjaga rahasia dan privasi data para penggunanya.
- Anggaran Diskominfo Sumatera Barat Yang Terbatas. Faktor yang menghambat proses advokasi dan komunikasi pencegahan berita hoax oleh Diskominfo Provinsi Sumatera Barat yaitu anggaran Diskominfo Sumatera Barat yang terbatas sehingga

perlu kerjasama dengan pihak kepolisian dan *stakeholder* yang lain.

b) Faktor Pendukung

Adapun faktor-faktor yang mendukung proses advokasi dan komunikasi pencegahan berita hoax oleh Diskominfo Provinsi Sumatera Barat antara lain, sebagai berikut :

- Adanya Undang-Undang ITE. Faktor yang menghambat proses advokasi dan komunikasi pencegahan berita hoax oleh Diskominfo Provinsi Sumatera Barat yaitu adanya Undang-Undang ITE sehingga masyarakat akan berhati-hati dalam menyebarkan berita bohong.
- Adanya Bantuan Dari Masyarakat. Faktor yang menghambat proses advokasi dan komunikasi pencegahan berita hoax oleh Diskominfo Provinsi Sumatera Barat yaitu adanya bantuan dari masyarakat dalam mencegah penyebaran berita bohong.

PENUTUP

Dari hasil temuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan kesimpulan pada penelitian ini yaitu: Implementasi program advokasi untuk meningkatkan literasi digital oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. (a) Advokasi melalui kerjasama. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat melakukan advokasi melalui kerjasama itu selalu ada jika suatu waktu dibutuhkan dengan pihak-pihak terkait, bukan hanya Kepolisian saja namun kerjasama ini dilakukan kepada pengguna sosial media itu sendiri dimana pihak kepolisian menghimbau kepada para pengguna media sosial online agar tidak mudah menyebarkan informasi atau konten-konten yang belum pasti kebenarannya. (b) Advokasi melalui pengawasan. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat melakukan advokasi melalui pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh tim cyber di media sosial online, jika ada akun yang terdeteksi menyebarkan konten-konten atau isu sara, dan informasi hoax maka anggota cyber crime akan segera mengawasi akun tersebut dan mungkin sampai pada pemblokiran akun.

Implementasi program komunikasi untuk meningkatkan literasi digital Oleh Dinas

Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. (a) Advokasi dan komunikasi melalui sosialisasi. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat melakukan proses komunikasi melalui sosialisasi. Sosialisasi sangat dibutuhkan karena dengan sosialisasi dapat mencerdaskan masyarakat sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengetahui kebenaran suatu berita sebelum menyebarkannya. (b) Komunikasi melalui gerakan anti hoax. Proses komunikasi melalui gerakan anti hoax ini akan lebih mudah diterima dan digaungkan oleh masyarakat sehingga masyarakat Sumatera Barat lebih cerdas dalam menggunakan media sosialnya.

Faktor yang mempengaruhi advokasi dan komunikasi dalam pencegahan penyebaran berita hoax oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. (a) Faktor penghambat. Adapun faktor yang menghambat advokasi dan komunikasi pencegahan penyebaran berita hoax oleh Diskominfo Sumbar yaitu pelaku menggunakan akun palsu, komitmen media sosial yang sangat menjaga privasi penggunanya dan anggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang terbatas. (b) Faktor yang mendukung. Adapun faktor-faktor yang mendukung proses advokasi dan komunikasi pencegahan berita hoax oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yaitu adanya undang-undang ITE dan adanya bantuan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S., Nuraini, Q., & Nugroho, D. R. (2019). *Pengaruh kampanye komunikasi pada gerakan "bogoh ka bogor" terhadap perubahan sikap masyarakat*. 3(September), 124–133.
- Aminah, A., & Ekstrak, N. (2019). Akibat Hoax di Alat Sosial Facebook kepada Pemilih Pendatang baru. *Harian Komunikasi Global*.
- Ardiyanti, H. (2018). Pilkada Berbarengan 2018 serta Etika Alat Sosial. *Kabar Pendek*, 10 (1), 25–30.
- Beritasatu. com. (2017). Jokowi: Penguasa Terus Perangi Hoax. Retrieved June 16, 2020,

- Berakal, A. (2017). Informasi Dusta (Hoax) Di Media Sosial Serta Pembuatan Pandangan Khalayak. *Kabar Pendek*, 9 (1), 17–20.
- CNN Indonesia. com. (2016). Penyebar Informasi Hoax di Indonesia Dapat Raup Rp700 Jutaan. Retrieved September 11, 2020.
- Elcaputera, A., & Dinata, A. W. (2019). Penegakan Hukum Penyebaran Informasi Dusta (Hoax) dalam Penajaan Pemilu 2019 ditinjau dari Rancangan Kesamarataan Pemilu. Call For Paper.
- Harahap, N. (2014). Riset Daftar pustaka. *Harian Iqra'*, 8 (1), 68–73.
- Ireton, C., & Posetti, J. (2019). *Jurnalistik, "Informasi Ilegal", serta Disinformasi Kondisi Indonesia*. Jakarta: UNESCO Office.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknis Efisien Studi Komunikasi*. Jakarta: Emas Prenada Alat Group.
- Kominfo. go. id. (2017). Membekukan 6. 000 Web Hoax, Kemkominfo: Penyebaran Sangat Besar di Januari. Retrieved June 16, 2020.
- Nurlatifah, Meter., & Irwansyah. (2019). Fact- Checking Journalism Selaku Program Kerja sama Human and Machine Pada Jurnalistik Digital. *Harian Komunikasi*, Daya muat 13, Nomor2, 121-134.
- Rini, 2014, *Pengembangan Perkotaan dalam Masa Teknologi Data serta Komunikasi*, Gadjah Mada University Press. Belas kasih, Abdur, 1992, *Perbuatan Kejahatan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Melton Putra).
- Setya Watie, E. D. (2011). *Komunikasi Serta Alat Sosial*. *Harian The Messenger*, 3, 69-75